

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip utama transaksi keuangan berbasis syariah antara lain mengkedepankan *fair deal*, merekomendasikan sistem bagi hasil, dan larangan riba, gharar, dan maysir. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional. Seperti fatwa Majma' al Fiqh Al-Islami 20 Maret 1990 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk. Di beberapa Negara, sukuk telah menjadi instrumen penting untuk pembiayaan anggaran Negara untuk pembiayaan proyek tertentu. Penerbitan sukuk pertama kali di Indonesia dilakukan oleh PT. Indosat Tbk (ISAT) pada tahun 2002. Penerbitan UU SBSN sendiri baru dilakukan pada tahun 2008, dan hingga kini penerbitan Sukuk Negara dilakukan secara regular baik di pasar domestik maupun

internasional. Penerbitan sukuk negara dilakukan untuk kepentingan pembiayaan proyek insfrastruktur.

Adanya ketersediaan infrastruktur adalah suatu pendorong bagi perkembangan ekonomi, meminimalisir kemiskinan, dan pendistribusian untuk kesejahteraan. Infrastuktur dapat menciptakan potensi utama bagi perekonomian, sejak itu mereka banyak memberikan manfaat dari segi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Adanya infrastruktur yang meningkat akan berdampak menghasilkan kontribusi bagi pertumbuhan bangsa. Saat ini, keberadaan infrastruktur memiliki peranan penting bagi perkembangan perekonomian nasional, karena dengan adanya infrastruktur di suatu negara akan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Namun perlu diketahui dan dipahami, bahwa pemenuhan anggaran dalam pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jumlahnya yang sangat terbatas, guna mengatasi celah dalam pembiayaan infrastruktur.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam anggaran infrastruktur pihak pemerintah mencari sumber dana alternatif dalam anggaran pembangunan infrastruktur, seperti menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman dari luar Negeri dalam bentuk utang, baik dari Negara-negara lain (misalnya Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya) atau pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional (IDB, ADB, IMF, *Word Bank* dan sebagainya). Saat pemerintah menerbitkan SUN tidak lepas dari beban bunga yang besar yang ditawarkan

kepada investor sehingga menjadi beban Negara dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membayar bunganya.

Di kalangan masyarakat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk masih banyak yang belum mengetahui dan belum memahaminya secara mendalam. Banyak pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa sukuk merupakan Surat Utang Negara (SUN). Hal tersebut merupakan pernyataan yang salah, bahwa SBSN atau sukuk merupakan surat berharga syariah dengan sistem syariah, dengan menggunakan *underlying asset* atas kepemilikan investor. Kemudian Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi merupakan surat berharga dengan pernyataan utang dari penerbit ke investor sifatnya (*non-* syariah). Akad yang dipergunakan dalam penerbitan sukuk menggunakan akad ijarah, dan untuk ujarah atau imbal balik dari akad ijarah dari sukuk tersebut bersifat pasti. Hal tersebut banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat, seakan-akan SBSN atau sukuk disamakan dengan obligasi.<sup>2</sup>

Negara Indonesia berpotensi dalam mengembangkan SBSN atau sukuk sangat besar. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, menyatakan bahwa sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin. Sukuk tidak tergolong dalam instrumen utang melainkan

---

<sup>2</sup>Muhammad Kholid, Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Surat Berharga Syariah Negara Indonesia, Hurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 3, No. 2, Desember 2019

penyertaan dana atau investasi yang hakikatnya ada prinsip bagi hasil. Pernyataan tersebut menjadikan landasan hukum antara emiten atau penerbit (mudharib) dan investor (shohibul maal atau pemilik dana), tidak termasuk utang piutang tetapi bentuk penyertaan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa sukuk merupakan transaksi utang piutang. Hal ini yang menjadikan masyarakat beranggapan salah mengenai sukuk dan disisi lain masyarakat banyak yang menyamakan sukuk dengan obligasi.<sup>3</sup> Obligasi adalah surat berharga yang sifatnya adalah utang, dengan memberikan keuntungan kepada pemiliknya berupa bunga yang telah disepakati.

Selanjutnya mengenai sukuk merupakan surat berharga syariah dengan bukti kepemilikan atas suatu aset yang berwujud, hak atas manfaat, yang sistemnya berlandaskan pada syariah, menghindari sistem bunga dari obligasi. Pernyataan diatas sesuai dengan tujuan diterbitkan sukuk yaitu menggantikan obligasi yang bersifat utang dan membayarnya berdasarkan sistem bunga. Obligasi menunjukkan bahwa penerbit berhutang kepada investor, sedangkan sukuk diatur untuk mengalihkan kepemilikan atas satu atau lebih aset dasar (*underlying aset*).

Penduduk warga negara Indonesia mayoritas adalah bergama islam, tetapi masih banyak diantaranya yang belum memahami mengenai perbedaan sukuk dan obligasi (konvensional). Ketidapkahaman masyarakat mengenai SBSN atau

---

<sup>3</sup>Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan sukuk sebagai insrumrn pembiayaan dan Investasi unuk mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia, Jurisprudence, Vol 7, No.1, Juni 2017

sukuk membawa dampak pihak investor masih sering membandingkan keuntungan yang didapatkan dengan obligasi konvensional. Hal tersebut diperparah dengan adanya aspek operasional sukuk yang belum jelas, disebabkan belum ada aturan terkait standar baku untuk operasional serta bentuk pencatatan akuntansinya terkait SBSN atau sukuk. Dampak yang ditimbulkan yaitu keraguan para praktisi dalam membantu mengembangkan instrumen SBSN atau sukuk yang masih relatif baru.

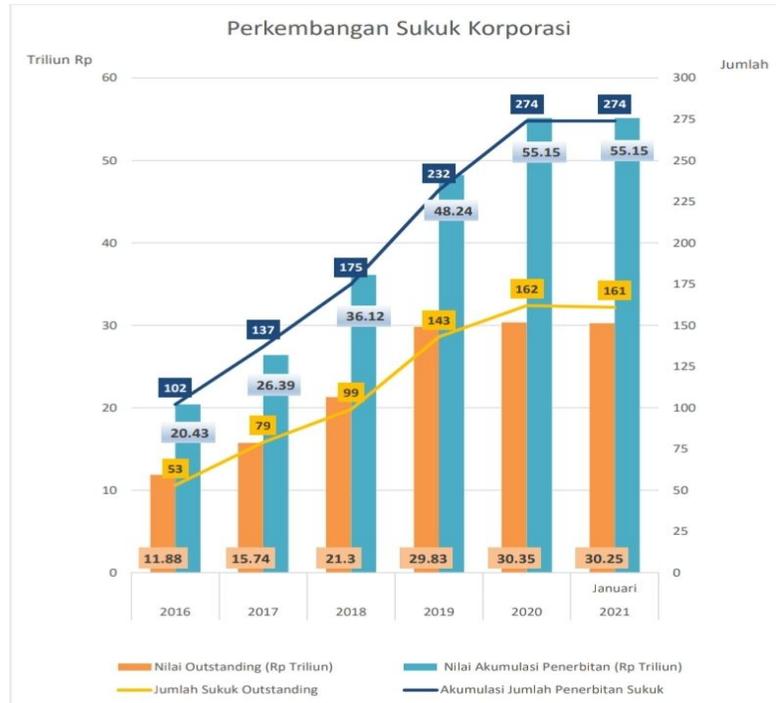
Dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan SBSN atau sukuk diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami apa sebenarnya SBSN atau sukuk, perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional agar tidak menjadikan kegelisahan dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan praktisi, pengamat, akademisi, ulama dibidang ekonomi Islam. Keterlibatan pihak praktisi, akademisi, dan ulama sangat diperlukan dalam usaha obligasi syariah atau sukuk. Selain itu perlu ditingkatkan undang-undang yang menagatur mekanisme terkait SBSN atau sukuk.

Sumber dana pinjaman dari luar negeri berdampak sangat merugikan negara, karena menggunakan sistem bunga, sehingga diperlukan alternatif baru sebagai sumber pendanaan Infrastruktur yaitu dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara atau dikenal dengan Sukuk merupakan surat berharga negara dengan prinsip syariah. Di pasar keuangan Indonesia, penerbitan sukuk baik dipasar dalam negeri maupun pasar internasional untuk pembiayaan defisit APBN dan pembiayaan pembangunan

infrastruktur dimulai sejak adanya undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Salah satu pertimbangan munculnya Undang-undang ini adalah bahwa potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang yang besar belum dimanfaatkan secara opsional (UU No.19/2008). Dengan adanya undang-undang ini maka sukuk sebagai instrumen keuangan syariah memiliki kepastian hukum pasti dan berpeluang untuk senantiasa berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan negara. Adapun peran SBSN atau sukuk sebagai penyedia alternatif sumber pembiayaan APBN, penyedia instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah, mengembangkan pasar keuangan syariah, dan menyediakan *benchmark* (tolak ukur) bagi penerbitan sukuk korporasi. Pada hakikatnya sukuk adalah surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset yang terkait dengan investasi dan tidak termasuk dalam hutang kepada penerbit utang atau obligasi. Oleh karena itu dalam penerbitan sukuk harus berdasarkan *underlying asset* yaitu adanya suatu transaksi pendukung berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga (riba) seperti obligasi dalam keuangan konvensional, tetapi sukuk sebagai instrumen investasi.

Gambar 1. Perkembangan Sukuk di Indonesia



Sumber: Statistik Sukuk Januari 2021, Direktorat Pasar Modal Syariah - OJK

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada suatu negara. Jika infrastruktur tidak memadai tentunya akan menghambat kemajuan dan kompetisi negara dibanding dengan negara lainnya. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia pasar keuangan syariah termasuk sukuk tumbuh secara cepat, meskipun porsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah

mengesahkan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk.<sup>4</sup>

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara yang lazim dilakukan oleh suatu Negara. Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutupi defisit APBN dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo. Pemerintah saat ini berusaha melakukan penambahan belanja negara yang sifatnya produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana publik, pembangunan konektivitas antar wilayah, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dan rumah susun.<sup>5</sup> Data menunjukkan bahwa porsi pembiayaan infrastruktur terhadap total belanja Negara dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1 Anggaran Infrastruktur Negara

Tahun	Anggaran Infrastruktur (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2014	145,7	
2015	256,1	65,6
2016	269,1	5,1
2017	379,4	41,0
2019	410,4	8,2
2020	420,5	2,4

Sumber : Website Kementerian Keuangan, 2020

---

<sup>4</sup> Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indoensia: Analisis Peluang dan Tantangan, 2011

<sup>5</sup> Anisa Ilmia. Sukuk Negara dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*. Vol 1, No. 2 2020, hal 22-34

Rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin beragam membawa dampak pada semakin besarnya beban pengeluaran negara karena tidak diimbangi dengan ketersediaan dana di mana saat ini penerimaan rutin negara dari sektor pajak belum bisa ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan belanja Negara. Upaya yang dilakukan agar negara memperoleh dana adalah dengan pinjaman luar negeri yang tentu saja akan membawa konsekuensi pada semakin besarnya beban utang negara dan menambah berat posisi neraca anggaran negara. Selain itu dengan utang luar negeri bisa menyebabkan semakin besar beban negara karena terbebani dengan bunga.

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka dapat dipastikan bahwa instrumen-instrumen syariah akan laris di pasar modal Indonesia, termasuk obligasi syariah. Obligasi Syariah merupakan instrumen yang paling ampuh untuk menarik investor dari luar negeri khususnya di wilayah Timur Tengah, dengan adanya obligasi syariah investor yang ada di Timur Tengah lebih nyaman dan menyukainya, dibandingkan yang di konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini sebagai regulator dan pengawas industri keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi perkembangan industri keuangan nasional baik Lembaga keuangan bank dan *non*-bank. Melihat hal ini, perkembangan sukuk rupanya sejalan dengan upaya yang dilakukan OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perkembangan pasar modal

syariah di Indonesia yaitu mendorong pertumbuhan sukuk dari sisi *supply* dengan mengembangkan sukuk daerah.

Setiap tahun untuk pembiayaan proyek melalui SBSN semakin meningkat, baik dari jumlah kementerian atau lembaga pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan, jumlah proyek yang dibangun, maupun sebaran satuan kerja pelaksana proyek SBSN, dan alokasi proyek yang dikerjakan. Sebagai ilustrasi, alokasi anggaran untuk proyek yang dibiayai dengan menggunakan SBSN (Sukuk) pada tahun 2013 senilai Rp 800 miliar di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 1,57 triliun di Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2015 alokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp 7.13 triliun untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Agama, pada tahun 2016 sebesar Rp 13,57 triliun untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian (PUPR), dan Kementerian Agama, dan tahun 2017 sebesar Rp 16,76 triliun alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama.

Pada tahun 2018 pembiayaan proyek melalui SBSN mencapai Rp 22,53 triliun, alokasi anggaran proyek yang tersebar di 34 Provinsi di Kementerian Perhubungan, Kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) PUPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenristek, Badan Standarisasi Nasional, dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Selanjutnya untuk tahun 2019 alokasi pembiayaan

proyek sebesar 28,43 triliun untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK), Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN)<sup>6</sup>

Untuk anggaran SBSN dalam pembiayaan proyek infrastruktur menggunakan sistem *earmarked*, yaitu *Project Financing Sukuk*. Di Kementerian Agama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan termasuk pembiayaan yang bersifat baru, hal ini merupakan salah satu jasa Bapak Anggito Abimanyu pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun untuk Kementerian Agama telah membangun kurang lebih 145 gedung dengan biaya SBSN di 34 PTKIN. Gedung yang dibangun digunakan untuk ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, gedung dosen, auditorium, gedung asrama. Pada tahun 2015 terdiri atas 7 PTKIN, dengan anggaran Rp 281 miliar, tahun 2016 sebanyak 25 PTKIN dengan anggaran sebesar Rp 895 miliar, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 32 PTKIN dengan anggaran sebesar Rp 1.051 miliar, pada tahun 2018 sebanyak 34 PTKIN dengan anggaran 1.304 miliar. Untuk tahun 2019 ada 41 PTKIN dan untuk tahun 2020 ada 6 PTKIN. SBSN sangat penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pada PTKIN. Pembangunan gedung untuk sarana

---

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Penerbitan SBSN/ Sukuk Negara

pendidikan dari SBSN akan memicu dalam meningkatkan mutu PTKIN, sehingga bersaing dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup> Dalam pasal 41 Undang-undang Pendidikan Tinggi menjelaskan pemerintah dituntut menyediakan sarana belajar, sarana, dan prasarana. Karena ini adalah amanat undang-undang pemerintah dituntut untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk menyiapkan sarana belajar untuk mahasiswa, peran pemerintah dituntut untuk membuat terobosan-terobosan yang inovatif dalam penyediaan pembiayaan.

Salah satu alternatif untuk memenuhi pembiayaan tersebut pemerintah menerbitkan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada pasal 4 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.<sup>8</sup> Dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

<sup>8</sup> Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Negeri (PTKIN), Sukuk mengambil peranan penting dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu PTKIN di Tulungagung, yaitu Universitas Sayyid Ali Rahmatullah merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menggunakan dana sukuk untuk membangun beberapa gedung, yaitu Gedung K.H. Syaifuddin Zuhri, Gedung Arief Mustaqim, Gedung Perpustakaan, dan Laboratorium Agama

Gedung K.H. Saifuddin Zuhri yang diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Saifuddin yang dibangun dengan biaya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 35.496.901.000 pada tahun 2015. Gedung ini memiliki luas bangunan 8.621 m<sup>2</sup> memiliki 7 lantai dan dilengkapi 65 ruangan, terdiri 50 ruang kelas, 12 ruang untuk pimpinan staf dan laboratorium, aula utama serta dua ruang dosen. Ruang kelas dengan kapasitas 30-50 orang ini digunakan sebagai tempat belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Kemudian gedung K.H. Arif Mustaqiem yang diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Saifuddin yang dibangun juga menggunakan pembiayaan SBSN tahun 2016. Gedung K.H. Saifuddin Zuhri memiliki 6 lantai, dan dilengkapi 18 ruang kantor, 2 mushola, 44 ruang kelas, serta satu aula utama dibangun dengan anggaran lebih dari Rp 42.371.000.000. Selanjutnya gedung perpustakaan dengan bangunan yang megah dengan fasilitas lengkap lima lantai yang diresmikan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Luas bangunan mencapai 3.917 m<sup>2</sup> yang dibangun dengan Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) tahun anggaran 2019 senilai Rp 25.000.000.000. Beberapa fasilitas yang ada dalam gedung perpustakaan diantaranya ruang baca, *locker*, peminjaman mandiri, layanan *e-source*, perpustakaan digital (e-pustaka), *meeting room*, mushala, dan lainnya.

Jenis instrumen Sukuk Negara Indonesia ada tujuh yakni *Islamic Fixed Rate*, Surat Perbendaharaan Negara – Syariah, Sukuk Dana Haji Indonesia, Sukuk Negara Indonesia, *Project Based Sukuk*, Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Pembangunan Gedung SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung menggunakan SBSN - *Project Based Sukuk*.

Peneliti mengambil obyek penelitian di UIN Sayyid Ali Rahmatullah karena peneliti menganggap dengan pembiayaan infrastruktur melalui SBSN, kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah bisa bersaing dengan Perguruan tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya. Selain itu dengan adanya pembiayaan infrastruktur melalui SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang diwujudkan dalam bentuk gedung-gedung untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan berdampak yang signifikan terhadap naiknya peminat calon mahasiswa baru dari tahun ketahun. Adanya pembiayaan infrastruktur melalui SBSN sarana dan prasarana yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah semakin lengkap yang didukung adanya laboratorium-laboratorium di setiap jurusan, perpustakaan yang memadai dengan bentuk bangunan perpustakaan yang bagus. Selain itu perlu diimbangi dengan pemenuhan sumber daya manusia (dosen dan

tendik) yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan PTKIN yang unggul dan berdaya saing

Gedung UIN Sayyid Ali Rahmatullah selain dipergunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga di pergunakan untuk kegiatan sosial lainnya seperti tempat latihan manasik haji, tempat perkemahan (pramuka), tempat olahraga. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah meberikan izin bahwa gedung yang biasa dipergunakan untuk KBM bisa digunakan sebagai tempat isolasi mandiri ketika ada pandemi *covid-19* tahun lalu. UIN Sayyid Ali Rahmatullah dinilai oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sangat baik dalam pelaporan pembiayaan infrastruktur melalui SBSN.

Dengan adanya pembangunan insfrastruktur dari pembiayaan sukuk di kampus dakwah dan peradaban UIN Sayyid Ali Rahamatullah yang sebelumnya IAIN Tulungagung bisa menjadi PTKIN yang memberikan kontribusi lebih terhadap masyarakat dalam hal pengembangan pendidikan dan pengetahuan.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat topik “Instrumen Alternatif Pembiayaan Infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah Berbasis Surat Berharga (SBSN) *Project Based Sukuk*”. Judul ini menurut peneliti sangat penting diangkat karena dengan terobosan pembiayaan melalui SBSN atau sukuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Disamping itu penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh

pemerintah dapat digunakan secara produktif dan membawa maslahat bagi masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian dalam disertasi ini bagaimana mekanisme pembangunan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut, peneliti merinci rumusan masalah pada penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme lelang SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) pada pembangunan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana penggunaan struktur *ijarah asset to be leased* dengan menggunakan *underlying asset* pada SBSN Project Based Sukuk (PBS) membiayai pembangunan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung?
3. Bagaimana SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) membiayai pembangunan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung?
4. Bagaimana SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) menjadi instrumen mekanisme baru yang mampu mencukupi kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan teori mengenai konsep sukuk dengan melihat pembangunan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
2. Menganalisa mekanisme lelang *SBSN Project Based Sukuk* (PBS) UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
3. Mendeskripsikan dan menganalisa konsep penggunaan struktur *ijarah asset to be leased* dengan menggunakan *underlying asset* pada *SBSN Project Based Sukuk* (PBS) dalam membiayai pembangunan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
4. Menganalisa konsep *SBSN Project Based Sukuk* (PBS) membiayai pembangunan infrastruktur dan menjadi instrumen mekanisme baru dalam mencukupi kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung?

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian disertasi dengan judul Instrumen Alternatif Pembiayaan Infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah Berbasis Surat Berharga (SBSN) *Project Based Sukuk*, penulis mengelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dalam penelitian Instrumen Alternatif Pembiayaan Infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah Berbasis Surat Berharga (SBSN) *Project Based Sukuk* akan menemukan pengembangan konsep sukuk dalam pembiayaan infrastruktur di sektor PTKIN, karena sukuk merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur di berbagai sektor, misal sektor pendidikan yakni pembangunan gedung-gedung sekolah, perguruan tinggi, dan laboratorium.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian disertasi ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi para akademisi, dosen, mahasiswa, dalam kajian akademisi di ruang kuliah maupun mengisi seminar dan *workshop*. Bagi para peneliti yang akan datang, hasil penelitian disertasi ini bisa menjadi pijakan untuk melakukan kajian serupa yang lebih mendalam serta komprehensif. Di samping itu diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan penerbit sukuk dan juga emiten untuk lebih baik lagi dalam penerapan sukuk sesuai dengan prinsip syariah yang bermanfaat untuk pengambil keputusan dalam pengelolaan sukuk guna meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Instrumen Alternatif Pembiayaan Infrastruktur telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada sub ini peneliti akan menghadirkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jubril A. Salaudeen dengan judul *Sukuk: Potentials For Infrastructural Development in Nigeria*. Penelitian ini di muat dalam *Advanced International Journal of Banking, Accounting, and Finance (AIJBAF)*, Volume 3 Issue 7 (June 2021). Hasil penelitiannya menunjukkan kerusakan infrastruktur di negara Nigeria peringkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan sumber daya nasional untuk ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan. Adanya ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan akan meningkatkan kecerdasan, kebaruan, lapangan kerja, kepercayaan diri, penciptaan kekayaan, dan jaminan sosial. Namun sangat menyedihkan bahwa infrastruktur di Negeria dalam keadaan buruk, sehingga menciptakan krisis yang berkembang. Ketidakmampuan pemerintah Nigeria untuk mempertahankan dan menanggung infrastruktur yang ada seperti rel kereta api, jaringan perpipaan, usaha mikro kecil dan menengah, infrastruktur transportasi (darat, udara, air), energi listrik (keperluan industri dan rumah tangga), infrastruktur pendidikan, prasarana kesehatan, dan prasarana keamanan. Hal ini potensi sukuk sebagai alternatif keuangan dan berkelanjutan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Nigeria.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian dari Academy of Islam Studies, Universtiy of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, yang berjudul *Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia*. Penelitian ini diteliti

---

<sup>9</sup> Jubril A. Salaudeen. Sukuk: Potentials For Infrastructural Development in Nigeria. *Advanced International Journal Of Banking, Accounting, and Finance (AIJBAF)*, Vol 3 Issue 7 (June 2021), 104-113

oleh Taufiq Kurnaiawan, dan Asmak Ab Rahman, pada Jurnal Al-Adalah Vol. 16, Nomor 1, 2019. Hasil penelitiannya bahwa penerbitan sukuk PBS dari waktu ke waktu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan anggaran sukuk PBS yang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap instrumen yang digunakan berkonsep syariah. Peningkatan anggaran PBS dalam membangun infrastruktur nasional juga membuktikan bahwa instrumen syariah telah tumbuh di pasar modal. Sehingga secara bertahap akan mengurangi konsep riba yang beredar di pasar modal. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membantu pemerintah, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul *Infrastructure Project Financing Through Sukuk As an Alternative to Conventional Bond Financing*, yang diteliti oleh Ibraheem Alani Abdul Kareem dan Mohd Sadad Bin Mahmud, yang dimuat dalam JoMOR Volume 1, No. 19, 2019. Hasil penelitian ini yaitu pembiayaan infrastruktur telah menjadi perhatian utama, banyak negara dan hanya ada sedikit investasi asing langsung di negara berkembang karena berbagai alasan. Negara-negara ini mengajukan pinjaman dari lembaga internasional yang mahal dan banyak persyaratan yang dilampirkan. Dengan bukti telah menunjukkan dari Dewan Kerjasama Teluk dan Malaysia bahwa adopsi sukuk adalah cara yang

---

<sup>10</sup>Taufiq Kurnaiawan dan Asmak Ab Rahman. Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia, Al-Adalah Vol. 16 No. 1, 20, 2019

pasti menuju pembangunan infrastruktur di suatu negara. Penulis menganggap sukuk sebagai alternatif obligasi untuk proyek infrastruktur dan kebutuhan penting lainnya bagi negara untuk berkembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan infrastruktur yang terjadi di negara-negara yang telah mempraktekkan atau menggunakan sukuk sebagai alat pembangunan infrastruktur. Inovasi ini akan meningkatkan banyak keuntungan strategis dan pembangunan ekonomi negara dengan memanfaatkan sukuk sebagai sumber pendanaan alternatif.<sup>11</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Abubakar, dan Ibrahim Muhammad Baba di Departement of Islamic Studies, Yobe State University, Damaturu, dengan judul *Sukuk and Nation Building: A Theoretical Analysis of Sukuk Financing in Negeria*. Penelitian ini di muat di *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5, No. 1, 2020, hal 71-84. Hasil penelitiannya yaitu munculnya sukuk sebagai instrumen keuangan syariah merupakan perkembangan signifikan yang menyediakan sarana alternatif pendanaan bagi perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan. Terlepas dari kebaruan keuangan, sukuk dalam konteks Nigeria memiliki dampak yang sangat besar pada pembangunan bangsa. Selain itu sukuk memiliki potensi ekonomi yang tak terhitung jumlahnya untuk ekonomi Nigeria dalam hal pembangunan

---

<sup>11</sup>Ibraheem Alani Abdul Kareem dan Mohd Sadad Bin Mahmud, *Infrastruktur Project Financing Through Sukuk as an Alternattive to Conventional Bond Financing*. *JoMOR* Vol 1, No. 19, 2019

ekonomi, inklusi keuangan, diversifikasi ekonomi, kontrol likuiditas, dan pembiayaan infrastruktur.<sup>12</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul *Sovereign Sukuk: a Real Alternative for Financing Infrastructures in Sub-Saharan Africa*. Penelitian diteliti oleh Ghassen Bouslama. Hasil penelitian ini adalah pasar sukuk telah memenuhi minat yang berkembang di dunia muslim dan di tempat lain selama decade terakhir. Obligasi syariah adalah instrumen fleksibel yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Beberapa negara di Afrika telah mengadopsi jenis penerbitan sukuk ini dan di negara lain telah mengumumkan kesediaan mereka untuk menerbitkan instrumen ini dalam waktu dekat. Namun beberapa tantangan tetap harus diatasi di benua itu, sehingga penerbitan sukuk menjadi alternatif tambahan untuk membiayai proyek infrastruktur di Afrika. Keuntungan dari instrumen ini yaitu membiayai proyek-proyek infrastruktur yang ada di benua Afrika untuk meningkatkan.<sup>13</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahamad Faosiy Ogunbado, Ph.D, dengan judul *Infrastructural Development in Organisation of Islamic Cooperation (OIC) member Countries: Sukuk Mode Financing as Alternative*. Penelitian ini di muat dalam *Al-Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol 20 (2) Social Issue, 2019. Jenis metode penelitian yang

---

<sup>12</sup> Dr. Adam Muhammad Abubakar, dan Ibrahim Muhammad Baba. Sukuk and Nation building: A Theoretical Analysis of Sukuk Financing in Nigeria. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 5, No. 1. 2020, hal 71-84

<sup>13</sup>Ghassen Bouslama. *Sovereign Sukuk: a Real Alternative for Financing Infrastructures in Sub-Saharan Africa*. *Revue D'economie financiere*, Vol. 136, Issue 4, 2019, hal 411-428

digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, sukuk sebagai alternative atau pilihan yang lebih baik dari model konvensional pembiayaan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Selain itu alternatif pembiayaan sukuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pengambil kebijakan di negara-negara anggota OKI dan Sukuk merupakan pilihan lebih baik dalam pembiayaan proyek untuk pembangunan negara-negara muslim.<sup>14</sup>

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Norhayati Abdullah, dan Masri Azrul Nayan yang berjudul *Green Sukuk: Financing The Future to Sustainable Environment*. Penelitian ini dimuat dalam IJZIP (*International Journal of Zakat and Islamic Philantropy*) Volume 2, Issues 2, 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Green Sukuk sebagai alternatif mesra alam sekitar untuk pelaburan serta cabaran yang mungkin belum diketahui secara umum. Produk Green Sukuk merupakan produk yang masih baru dalam pasaran modal Islam, dan melihat bagaimana perkembangan proyek pembangunan di Malaysia. Terdapat beberapa kontrak yang sesuai dalam penerbitan green sukuk, dan mengetahui kategori proyek yang boleh dibuat bagi penerbitan green sukuk. Memberi keyakinan dan meningkatkan

---

<sup>14</sup>Ahamad Faosiy Ogunbado, Ph.D, Infrastruktural Development in Organisation Of Islamic Cooperation (OIC) Member Countries: Sukuk Mode Financing As An Alternative. Al-Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, Vol 20 (2) Special Issue, 2019, hal 36-48

kepercayaan pelabur terhadap green sukuk, serta dapat meningkatkan penyertaan yang lebih luas dalam pasaran green sukuk.<sup>15</sup>

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ibraheem alani Abdul Kareem, Mohd. Saddat bin Mahmud, dan Abdul Fattah Abdul Ganiyy, dengan judul *Thematic Review of Sukuk Ijarah issued in Negeria: An Opportunity for Economic Development*. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Iqtisaduna, Desember 2020. Hasil penelitian ini adalah Sukuk ijarah sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi yang cepat dan lien untuk berinvestasi di dalamnya. Kesalahpahaman diantara para pemimpin agama merupakan tantangan besar bagi pertumbuhan bank syariah dan implementasinya Sukuk di Negeria. Direkomendasikan agar lokakarya, seminar dan konferensi diselenggarakan oleh pusat-pusat islam, lembaga keuangan dan akademisi di Universitas untuk menyebarkan pengetahuan dan menciptakan kesadaran di kalangan Muslim Negeria dan no-muslim terkait manfaat dan keuntungan dari produk keuangan Islam dan Sukuk pada khususnya.<sup>16</sup>

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Fauziah, Nurwahidin dengan judul “Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara di Indonesia: Prosedur dan Struktur”. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal Ilmiah MEA

---

<sup>15</sup>Norhayati Abdullah, dan Masri Azrul Nayan, Green Sukuk: Financing The Future to Sustainable Environment. IJZIP (International Journal of Zakat and Islamic Philantropy) Vol 2, Issues: 2, 2020, hal 14-23

<sup>16</sup> Abdul Kareem, Mohd. Saddat bin Mahmud, dan Abdul Fattah Abdul Ganiyy, Thematic Review of Sukuk Ijarah issued in Negeria: An Opportunity for Economic Development Jurnal Iqtisaduna, Desember 2020.

(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Volume 4, Nomor 1, tahun 2020. Hasil penelitiannya yaitu memberikan gambaran bahwa setidaknya ada delapan tahap yang harus dilalui dalam pengurusan pembiayaan infrastruktur dengan sukuk Negara. Secara garis besar, struktur pembiayaan terbagi menjadi dua yakni *project financing* dan *project underlying*. Sedangkan struktur akad yang digunakan terdapat empat macam yaitu ijarah *asset to be leased*, ijarah – *Sale and Lease Back*, wakalah, dan Ijarah- al Khadamat.<sup>17</sup>

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Maula Robin Haq, Diah Putri Febiana Sari, dan Kharis Fadhullah Hana, dengan judul penelitian “Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur” Penelitian ini di publikasikan oleh AL-Mutharahah Volume 17 Nomor 1 Januari-Juni tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah sukuk menjadi instrumen keuangan yang penting diterapkan dalam pembangunan infrastruktur dan memiliki kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur. Sejak diterbitkan sampai tanggal 13 Februari 2020, akumulasi hasil penerbitan SBSN sudah mencapai Rp. 1.253,4 Triliun. Hasil penerbitan sukuk tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Jadi pemerintah bisa memaksimalkan potensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syifa Fauziah, Nurwahin, Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur dan Struktur. Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, Vol 4, No. 1 tahun 2020.

<sup>18</sup> Maula Robin Haq, dkk. Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur, AL-Mutharahah Vol. 17, No. 1 Januari-Juni 2020.

Kesebelas, penelitian yang berjudul “Sukuk Negara dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia” yang diteliti oleh Anisa Ilmia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang dimuat dalam Jurnal *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, Volume 1, Nomor 2 tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan bahwa sukuk Negara telah berperan sebagai sumber pembiayaan APBN. Penerbitan Sukuk Negara dengan berbagai macam seri sukuk telah memberi kontribusi yang besar dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Total nilai penerbitan dan *outstanding* sukuk Negara pun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa sukuk Negara adalah instrumen keuangan yang diminati oleh para investor, baik investor institusi maupun investor ritel atau perorangan karena selain bisa berinvestasi, investor pun bisa kontribusi dalam pembangunan Negara.<sup>19</sup>

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Pribadi, Politeknik Keuangan Negara – STAN, dengan judul Pemanfaatan Sukuk untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian ini dimuat dalam *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Volume 8, Nomor 2, tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa sukuk merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah yang prospektif karena pasar keuangan syariah yang masih terus tumbuh dan berkembang. Namun demikian, kendala pada pelaksanaan proyek yang berimbas

---

<sup>19</sup> Anisa Ilmia. Sukuk Negara dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, Volume 1, No. 2 Tahun 2020

pada tambahan biaya utang perlu diminimalkan. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengusulan proyek, penilaian kelayakan yang lebih ketat, serta mekanisme reward dan punishment untuk menjamin proyek berjalan tepat waktu harus diterapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pembiayaan proyek yang didanai dari utang terutama sukuk dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Ketigabelas, penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Sukuk Terhadap Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2014-2018, yang diteliti oleh Arif Pangestu Abitaha, dan Aris Soelistyo, diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Volume 5, Nomor 1, Februari Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini bahwa Sukuk Dana Haji (SDHI) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini dikarenakan sukuk dana haji Indonesia merupakan salah satu sumber dana yang didapat oleh LPKSI, yang kemudian dana yang telah terhimpun akan disalurkan kembali untuk publik. Sukuk Retail berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini dikarenakan output dari Sukuk Retail (SR) merupakan salah satu sumber dana untuk anggaran pendapatan dan belanja Negara Indonesia, yang salah satunya dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya *Project Based Sukuk* (PBS) berpengaruh positif

---

<sup>20</sup> Yanuar Pribadi, Pemanfaatan Sukuk untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur pada Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP), Vol. 8 No. 2, tahun 2020.

signifikan terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut didasarkan pada hasil uji parsial (Uji-t) yang dilakukan.<sup>21</sup>

Keempatbelas, penelitian yang diteliti oleh Fitrianto dengan judul Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. Penelitian ini dimuat dalam *At – Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume X, Nomor 1, Juni 2019. Hasil penelitian ini yaitu sukuk memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 2019 mencapai Rp. 1.044,71 triliun, sedangkan akumulasi Sukuk Pembiayaan Proyek pada tahun 2013-2019 mencapai Rp. 90,79 triliun. Selama lebih dari satu dekade SBSN telah menjadi salah satu instrument pembiayaan dan investasi syariah yang penting dalam pembangunan di Indonesia.<sup>22</sup>

Kelimabelas, penelitian yang diteliti oleh Uliyatul Mu'awwanah dengan judul Manifestasi Tazkiyah an-Nafs dalam Peranan “Sukuk Negara” sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Multidimensional. Penelitian ini dimuat di *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol 1, November 2019. Hasil penelitian ini yaitu sebagai salah satu instrumen dana pembangunan ekonomi, sukuk merupakan opsi yang baik bagipara investor dalam mengelola keuangan terutama dalam hal manajemen investasi. Secara garis besar sukuk adalah surat

---

<sup>21</sup> Arif Peangestu Abitaha, Aris Soelistyo. Analisis Pengaruh Sukuk Terhadap Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2014-2018, *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* Volume 5, Nomor 1, Februari tahun 2021

<sup>22</sup>Fitrianto. Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume X, Nomor 1, Juni 2019

berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang merepresentasikan bukti kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Adanya fitur *underlying asset* menjadi sebuah pembeda yang sangat tajam dengan obligasi konvensional<sup>23</sup>

Keenambelas, penelitian yang berjudul Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia: *Systematic Literature Review*, yang ditulis oleh Agita Eka Yuliani, Tettet Fitrijanti, dan Prima Yusi Sari dari Universitas Padjadjaran. Penelitian ini di muat dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 7, No. 12, Desember 2020. Hasil penelitiannya bahwa dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dibutuhkan berbagai alternatif skema pembiayaan yang termasuk salah satunya adalah sukuk. Terkait konsep pembiayaan proyek islami dan skema pembiayaan yang digunakan di Indonesia menjadi topik yang dominan untuk dibahas. Sementara topik tentang aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dan bagaimana jika sukuk diaplikasikan untuk pembiayaan bersama masih langka untuk dibahas.<sup>24</sup>

Ketujuhbelas, penelitian yang dilakukan oleh Nurbiyanto, dan Yanuar Pribadi, dari Politeknik Keuangan Negara STAN, dengan judul Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif

---

<sup>23</sup>Uliyatul Mu'awwanah, Manifestasi Tazkiyah an-Nafs dalam Peranan "Sukuk Negara" sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Multidimensional. Al—tsaman: jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 1No.1 2019

<sup>24</sup>Agita Eka Yuliani, Tettet Fitrijanti, dan Prima Yusi Sari. Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia: Systematic Literature Review. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 7, No. 12, Desember 2020.

Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. Penelitian ini di terbitkan JESYA (jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), Volume 3, No. 2, Juni 2020. Hasil penelitiannya yaitu pembangunan infrastruktur yang akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan, membutuhkan sumber pendanaan yang sangat besar. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proyek berdasarkan hasil penelitian ini meliputi permasalahan pada saat lelang, kontraktor yang kurang memenuhi kompetensi, minimnya akurasi perencanaan, dan evaluasi yang belum efektif. Meskipun permasalahan tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek *Project Based Sukuk* merupakan alternatif sumber pendanaan yang tepat untuk membiayai pembangunan proyek-proyek pada Kementerian/ Lembaga. Pasar keuangan syariah domestik yang masih terbuka menjadi keuntungan dalam pengembangan pasar keuangan Surat Berharga Syariah Negara sehingga instrumen Surat Berharga Syariah Negara terutama skema *Project Based Sukuk* merupakan alternatif pembiayaan yang potensial untuk terus dikembangkan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Kedelapanbelas, penelitian berjudul Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam menentukan Perteumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Penelitian ini di tulis oleh Siti Latifah, dan diterbitkan di JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) Volume 6, Nomor 3, 2020. Hasil penelitiannya yaitu pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001 – SR

---

<sup>25</sup>Nurbiyanto dan Yanuar Pribadi. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. JESYA Jurna Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Volume 3, No. 2, Juni 2020.

013. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus meningkat, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Peran Sukuk Negara memberikan dampak yang sangat positif, antara lain membiayai pengembangan proyek, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan merek cabang di pasar keuangan syariah, mengembangkan instrumen investasi alternatif, dan memanfaatkan dana masyarakat.<sup>26</sup>

Kesembilanbelas, penelitian yang berjudul Manajemen Pengelolaan Dana SBSN di Kementerian Agama Tahun 2016-2019, yang ditulis oleh Desmi Avicena Medina, dan di terbitkan di Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana SBSN di Kementerian Agama telah mendukung pencapaian program pembangunan sarana-prasarana untuk memenuhi layanan pendidikan keagamaan, layanan haji, layanan sosial-keagamaan, dan layanan keagamaan lainnya. Walaupun dinyatakan sukses dalam penyelenggaraan pembangunan sarana-prasarana yang bersumber dari dana SBSN, tetapi kendala-kendala yang dihadapi juga tetap terjadi, sehingga dibutuhkan upaya inovasi yang terus menerus dalam melakukan pembangunan sarana-prasarana SBSN di lingkungan Kementerian Agama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Siti Latifah. Peran Sukuk Surat Berharga Syariah (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam), Volume 6, Nomor 3, 2020.

<sup>27</sup>Desmi Avicena Medina.Manajemen Pengelolaan Dana SBSN di Kementerian Agama Tahun 2016-2019.Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 5, Nomor 2, oktober 2020.

Kedua puluh, penelitian yang berjudul Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia, yang ditulis oleh Khoirun Nisa. Penelitian ini diterbitkan oleh *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pada tahun 2008 pemerintah pertama kali menerbitkan Surat Berhaga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan defisit anggaran. Setelah empat belas tahun, jumlah penerbitan sukuk negara mengalami peningkatan di setiap tahun dengan berbagai seri SBSN yang berbeda. Penerbitan sukuk negara juga berperan dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Sukuk negara memiliki peranan yang besar memiliki peran besar dalam membiayai defisit APBN dan membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait mekanisme penerbitan sukuk negara dan implementasinya sebagai salah satu instrument pembiayaan defisit anggaran.<sup>28</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan cara mendasar untuk melakukan persepsi, berfikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Menurut Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa paradigma merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, dengan mengarah kepada cara berfikir dalam

---

<sup>28</sup> Nisak, Khoirun. 2022. Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol 2, No. 1 Januari-Juni 2022, hal 57-72

penelitian. Kemudian Baker mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang (1) membangun atau mendefinisikan batas-batas, (2) menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma pendekatan interpretif dalam mengungkap, menganalisis, serta memaknai nilai yang ada pada permasalahan penelitian yaitu terkait dengan Pembiayaan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah berbasis SBSN, peneliti menganalisis dengan pemaknaan realita yang ada dengan teori-teori yang relevan, kemudian peneliti menggunakan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretif yaitu sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung pada observasi.<sup>30</sup> Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna dari sosial. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, setiap gejala atau peristiwa bisa memiliki makna yang berbeda, ilmu bersifat induktif, berjalan dari spesifik menuju umum dan abstrak.

Penelitian kualitatif (khususnya pada paradigma interpretif) mendasarkan kepada analisis fenomenologi, artinya analisis dilakukan tidak hanya bertumpu

---

<sup>29</sup>Muslim, "Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi", *Wahana*, Vol. 1, No. 10, (Tahun 2016), hlm. 77-78.

<sup>30</sup>Newman, LW. *Sosial Research methods Qualitative and Quantitative*.2000 hal 68

kepada realitas yang tampak (gejala) tetapi hakikat persoalan sebenarnya dari gejala yang tertangkap. Fenomena sendiri dapat dipilah menjadi beberapa bagian-bagian noema (gejala yang tertangkap oleh indera) dan noesis (asal noema). Paradigma interpretif memandang realita sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timba balik (*reciprocal*), dan bukan kausalitas<sup>31</sup> Dengan desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan mencari data dan informasi berupa fenomena atau terkait praktik pembiayaan infrastruktur berbasis SBSN yang ada di lapangan dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan teori yang relevan dengan topik penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Data yang digunakan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut bersumber dari atau didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu

---

<sup>31</sup>Creswell. W. John. *Research Design.Fifth Edition*. Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches. Sage.2018, hal 49-50

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>32</sup> Creswell menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif memiliki karakteristik: (a) sumber data diperoleh dari datar alami, (b) peneliti adalah instrumen kunci, (c) laporannya sangat deskriptif, (d) analisisnya bersifat induktif, (e) verifikasi data dilakukan melalui triangulasi, (f) partisipan dilakukan sejajar dengan peneliti, (g) sampelnya bersifat purposive, dan (h) desain penelitiannya berkembang dilapangan.<sup>34</sup>

Metode penelitian kualitatif itu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah *experimen*, dimana instrumen kuncinya adalah peneliti tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan analisis datanya bersifat induktif, serta hasil dari penelitian kualitatif tersebut lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>35</sup> Penelitian ini dikaji secara mendalam menggunakan kualitatif fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar dan alamiah dalam penerapan peran

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moelong, Metode penelitian kualitatif edisi revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015

<sup>33</sup> Creswell. W. John. *Research Design.Fifth Edition*. Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches. Sage. 2018

<sup>34</sup> W. Mantja, Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan (cet II: Malang: Wineka Media, 2005), hal 50-51

<sup>35</sup> Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hal 7

sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembiayaan infrastruktur pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

Peneliti melakukan dengan melihat secara langsung kegiatan di lapangan. Untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tersebut, peneliti juga harus memahami pengertian yang memadai tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai perwujudan dari peran sukuk SBSN terhadap pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini dilakukan lebih banyak berkenaan dengan studi tentang peran sukuk SBSN terhadap pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui mengenai perencanaan, pelaksanaan sukuk SBSN, dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan, untuk itu menurut peneliti cocok menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Dari beberapa pandangan tentang definisi penelitian kualitatif tersebut, maka peneliti merangkum alasan mengapa peneliti menggunakan metode ini. Adapun beberapa pertimbangannya sebagai berikut

- a) Peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif karena peneliti membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap alternatif pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Peneliti bertanya langsung dengan tim kelompok kerja (pokja) SBSN yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, dan peneliti berharap untuk memberikan pendapat yang sesuai dengan apa adanya dan sesuai dalam literatur

b) Penelitian kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui manfaat terkait dengan alternatif pembiayaan infrastruktur berbasis SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah dengan berbicara kepada orang yang tidak terlibat dalam tim pokja, dan mengetahui bangunan serta dokumentasi.

### 3. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan, dalam memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian dilapangan perlu dilakukan.<sup>36</sup> Penelitian ini berlangsung dengan latar alamiah yang menuntut peneliti hadir di lapangan, melakukan pengamatan subyek penelitian dan informan sekaligus menghimpun dokumen yang diperlukan.

Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang penelitian yang dibahas. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dengan melakukan observasi serta wawancara. Peneliti harus bersikap sebaik mungkin, hati-hati, dan sungguh-sungguh dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, sehingga data yang terkumpul benar relevan dan terjamin keabsahannya. Berkaitan dengan data yang dibutuhkan peneliti akan langsung melakukan observasi dan juga

---

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, hal 4

melakukan wawancara dengan tim pokja (kelompok kerja) yang menangani SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, dan dengan Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, peneliti menetapkan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, yang beralamat di Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Tulungagung. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut, yaitu (a) Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri ini sangat diminati oleh masyarakat sekitar Kota Tulungagung, dan daerah sekitarnya, (b) Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berkembang, dan (c) Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri ini salah satu lembaga pendidikan tinggi yang menerima pembiayaan Sukuk SBSN dalam pembangunan infrastruktur untuk sarana dan prasarana pendidikan.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga bisa disebut dengan suatu studi komparatif.

Komparatif merupakan penelitian dengan melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena pada waktu yang berbeda.<sup>37</sup> Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan antara kualitas pendidikan sebelum adanya Sukuk SBSN dan sesudah terhadap pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

## 6. Sumber data penelitian

Sumber data merupakan subyek darimana data yang diperoleh.<sup>38</sup> Perolehan sumber data harus diperoleh secara tepat, apabila sumber data tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari secara langsung dari lapangan.<sup>39</sup> Jadi data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data primer dalam penelitian adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari informan

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal 197

<sup>38</sup> Suharsini Arikunto, *Procedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal 102

<sup>39</sup> S. Nasution. *Metode Research*, Bandung: Jemmars, 1988, hal 185

terkait dengan masalah yang diteliti dengan cara wawancara maupun dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan terkait fokus penelitian dengan observasi. Informan dalam penelitian ini yaitu bagian keuangan dan perencanaan yang terlibat dalam Sukuk SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah.

Dalam analisis isi, data primernya adalah isi komunikasi yang diteliti. Data primer ini termasuk data mentah yang harus diproses lagi sehingga menjadi informasi yang bermakna.<sup>40</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya. Sehingga menjadi informatif bagi pihak lain, karena data sekunder ini bersifat melengkapi data primer.<sup>41</sup> Pendapat lain bahwa data sekunder merupakan data dari berbagai dokumen, tulisan, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>42</sup> Dari penjelasan diatas bahwa sumber data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer ditentukan secara purposive sampling, menentukan informan yang dipandang sangat mengetahui mengenai peran SBSN dalam pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada tiga sumber yaitu orang, tempat kejadian, dan dokumen atau data-data tertulis.

---

<sup>40</sup> Rachmat Kriyantoro, *Teknis Praktis riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hal 42

<sup>41</sup> Rachmat Kriyantoro, *Teknis Praktis riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hal 42

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 157

- a) Orang adalah sumber data yang berkaitan dengan orang yang terlibat dalam peran sukuk SBSN terhadap pembiayaan infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah, pihak kementerian keuangan, serta tenaga pendidik dan dosen.
- b) Tempat merupakan kegiatan yang terkait dengan peran sukuk SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.
- c) Dokumen yaitu peneliti memperoleh informasi atau data melalui sumber dokumen atau arsip-arsip baik dokumen yang berisi data fokus penelitian seperti profil UIN Sayyid Ali Rahmatullah maupun data yang menyangkut permasalahan peneliti.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan yang relevan, akurat dan terandalkan yang bertujuan untuk menciptakan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut

- a) Wawancara mendalam, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>43</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan atau dijawab secara lisan pula. Sebagai pencari informasi peneliti melakukan

---

<sup>43</sup> Rachmat Kriyantoro, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020, hal 100

kontak langsung atau tatap muka langsung dengan sumber informasi.<sup>44</sup> Wawancara kepada informan sebagai narasumber dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi berkenaan dengan fokus penelitian. Dalam proses wawancara dilakukan secara formal, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur. Informan yang peneliti merupakan tim pokja (kelompok kerja) yang menangani Pembiayaan infrastruktur berbasis SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Dalam melengkapi informasi dari hasil wawancara, peneliti melakukan pengecekan ulang atau triangulasi, dan dilakukan pengamatan serta dokumentasi dengan melihat kejadian, catatan-catatan atau laporan pelaksanaan, yang meliputi proses perencanaan sukuk SBSN terhadap pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, proses pelaksanaannya sukuk SBSN terhadap pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, dan pengaruh kualitas pendidikan dengan adanya sukuk SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

- b) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuai objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.<sup>45</sup> Observasi atau pengamatan adalah metode atau cara mengadakan pencatatan dan menganalisis secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 87

<sup>45</sup> Rachmat Kriyantoro, Teknis Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020, hal 100

kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.<sup>46</sup> Metode ini dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati dan mencatat hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian yang meliputi kondisi Gedung di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, meliputi (Gedung KH. Saifuddin Zuhri, Gedung KH. Arief Mustakqim, dan Gedung Perpustakaan) dan sarana prasarananya, perencanaan serta pelaksanaan sukuk SBSN di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pengamatan ini merupakan tahap yang dilakukan secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- c) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dokumentasi yang bertujuan untuk menggali data-data dimasa lampau secara sistematis dan objektif.<sup>47</sup> Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang dihasilkan dari catatan penting yang terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan valid. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap terhadap data primer yang didapat dari hasil wawancara mendalam.<sup>48</sup> Sebagai bahan pelengkap data diperlukan beberapa informasi, meliputi letak geografis,

---

<sup>46</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal 94

<sup>47</sup> Rachmat Kriyantoro, Teknis Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020, hal 120

<sup>48</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal 158

sejarah berdirinya, struktur organisasi, sarana dan prasarana di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mempertajam peneliti mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>49</sup> Kemudian data yang sudah terkumpul, dianalisa menjadi beberapa jenis. Pertama, menggunakan analisa deskripsi, yaitu analisa dengan memaparkan data secara sistematis dan logis disetiap aspek yang diteliti. Kedua, menganalisis data yang dilakukan secara induktif dengan model interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.<sup>50</sup> Analisis data dilakukan sesuai petunjuk Miles dan Huberman. Tahap peneliti ketika sudah kembali dari lokasi penelitian adalah tahap analisis data yaitu membuat analisis secara keseluruhan dan secara langsung ketika kembali dari lapangan, mengklasifikasi semua data yang sudah terkumpul.

Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis data, diantaranya<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal 104

<sup>50</sup> MB. Miles dan Huberman. 1972. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta UI Pres. Hal 21

<sup>51</sup> Miles, Matthew B and A Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, (London: Sage publication, 1994), h. 119

a) *Reduction data* (reduksi data)

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai dengan bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman dalam satuan analisis, kemudian pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

b) *Display Data* (penyajian data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis

c) *Data conclusion drawing/ verification* (Pengarikan Kesimpulan)

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, tetapi sifatnya masih belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Diawali dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan pengarikan kesimpulan

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, catatan lapangan, dan kepustakaan untuk mendapatkan pengetahuan dari data tersebut, kemudian memformulasikan secara deskriptif, selanjutnya memproses data tersebut.

Data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan matrik. Data yang disajikan dalam bentuk catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan dokumentasi. Setiap data yang sudah direduksi akan diberikan kode dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks. Kemudian yang terakhir selanjutnya yaitu kesimpulan, penarikan atau verifikasi, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data kualitatif model deskriptif komparasi. Data yang sudah proses reduksi dan yang disajikan selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti di bagian awal.

#### 9. Pengujian Keabsahan Data

Dalam tahap pengujian keabsahan data, peneliti melakukan pengamatan atau observasi yang mendalam, dan triangulasi. Pengamatan secara mendalam merupakan langkah pemusatan diri dari suatu hal tertentu secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol terhadap fokus penelitian. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi tertentu yang sekiranya relevan dengan permasalahan penelitian ini. Peneliti dapat memeriksa kembali (*me-rechek*) temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode atau teori, Kemudian triangulasi, merupakan teknik gabungan dengan

berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang yang berbeda. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian.

#### 10. Proposisi Penelitian

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena- fenomena yang terjadi. Dari judul penelitian ini, maka proposisinya yaitu

- a) Mekanisme lelang SBSN PBS pada pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah
- b) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah berbasis Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)
- c) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mempunyai manfaat yang banyak dalam proses pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah
- d) Konsep SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan mekanisme baru dalam mencukupi anggaran dalam pembangunan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Dalam ulasan diatas terkait proposisi dapat dikategorikan menjadi proposisi mayor dan proposisi minor. Proposisi mayor yaitu pernyataan kesimpulan secara umum berdasarkan kesimpulan yang diperoleh pada proposisi minor. Proposisi minor dapat bermakna dari kategori utama yang digunakan pada

penelitian berdasarkan informasi yang ada, pada tahap ini dibuat kesimpulan pada setiap kategori berdasarkan informasi yang diperoleh pada penelitian. dari penelitian peneliti yang berjudul Instrumen Alternatif Pembiayaan Infrastruktur UIN Sayyid Ali Rahmatullah Berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan PBS (*Project Based Sukuk*). Dalam hal ini untuk premis mayor dalam penelitian ini terletak pada Pembiayaan Infrastruktur, kemudian untuk premis minor terletak pada unsur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Berdasarkan penelitian ini, proposisi minor terletak pada SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dengan adanya pembiayaan infrastruktur melalui SBSN, khususnya di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, tentunya semakin bertambah prosentase minat calon mahasiswa baru pada setiap tahunnya. Jadi SBSN yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah membawa dampak yang baik terhadap perkembangan kampus. Kemudian untuk proposisi mayor berdasarkan penelitian di atas bahwa proposisi mayor terletak pada pembiayaan infrastruktur di UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Pembiayaan yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, rata-rata memanfaatkan dari pembiayaan infrastruktur dalam proses pengembangan kampus